

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	Untuk Mengetahui Mutu Pelayanan di Kecamatan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Diukur melalui 14 (Empat Belas) Unsur Pelayanan, di antaranya : 1. Prosedur Pelayanan 2. Persyaratan Pelayanan 3. Kejelasan Petugas Pelayanan 4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 6. Kemampuan Petugas Pelayanan 7. Kecepatan Pelayanan 8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan 9. Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan 10. Kewajaran Biaya Pelayanan 11. Kepastian Biaya Pelayanan 12. Kepastian Jadwal Pelayanan 13. Kenyamanan Lingkungan 14. Keamanan Pelayanan
		Persentase Keluhan / Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti	% (Persen)	Sebagai Alat Ukur Kekurangan dan Kesalahan / Evaluasi dalam Melakukan Pelayanan	Jumlah Keluhan / Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti Dibagi Jumlah Keseluruhan Keluhan / Pengaduan di Kecamatan Dikali 100%	Kecamatan	Keluhan / Pengaduan Pelayanan adalah Ketidaksesuaian antara Kualitas Pelayanan yang Diterima oleh Masyarakat dengan Janji Sebagaimana Tercantum pada Maklumat dan Standar Pelayanan yang Dijanjikan oleh Penyelenggara Layanan, Baik Secara Tertulis, Melalui Media Sosial, Elektronik, dan Lain-Lain. Apabila Tidak Ada Keluhan atau <i>Zero Complain</i> , Maka Capaian Kinerja adalah 100%.
		Persentase Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu	% (Persen)	Untuk Mengetahui Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu Sebagai Bagian dari Tugas dan Fungsi Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang Tepat Waktu Dibagi Jumlah Keseluruhan Pelayanan di Kecamatan Dikali 100%	Kecamatan	Jenis Layanan Umum yang Dihitung, di antaranya : 1. Legalisasi 2. Ahli Waris 3. Belum Menikah 4. Dispensasi Menikah 5. Keterangan Tidak Mampu 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 7. Surat Pengantar Pindah Datang 8. Surat Pengantar Pindah Luar Daerah 9. Surat Pindah Antar Kecamatan 10. Domisili Perusahaan / Kelembagaan 11. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 12. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 13. Surat Izin Tempat Usaha / Gangguan Usaha (SITU / HO) 14. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan Kecil 15. Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Promosi (SIUPPIP) 16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 17. Tanda Daftar Industri (TDI)
		Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Representatif	Jumlah	Untuk Mengetahui Kelengkapan / Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di Kecamatan	Berdasarkan Kelengkapan / Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Publik	Kecamatan	Sarana dan Prasarana yang Dimaksud, di antaranya : 1. Ruang Tunggu 2. Kursi Tunggu 3. Pendingin Ruangan (AC / Kipas Angin) 4. Televisi 5. Brosur Pelayanan 6. Papan Informasi Pelayanan 7. Koran / Majalah 8. Ruang Laktasi 9. Area Bermain Anak 10. Toilet Umum 11. Area Parkir 12. Sarana Pengaduan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan kecamatan.	Persentase Jumlah Kelurahan yang Menerapkan Program HBS / PHBS	% (Persen)	Untuk Mengetahui Kelurahan yang Menerapkan Program HBS / PHBS	Jumlah Kelurahan yang Menerapkan Program HBS / PHBS <i>Dibagi</i> Jumlah Kelurahan se-Kecamatan <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan	Kriteria Kelurahan yang Menerapkan Program Hijau, Bersih, dan Sehat (HBS), Dapat Dilihat dari Beberapa Indiator, di antaranya : 1. Kebersihan a. Kebersihan Lingkungan : - Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah yang Memadai - Tersedianya Pengelola Sampah (Bank Sampah dan Petugas Kebersihan Sampah) - Pemilahan Sampah b. Drainase : - Kebersihan Drainase - Drainase Mengalir dengan Baik - Drainase Tidak Menggenang 2. Kesehatan 3. Lingkungan Hidup a. Pohon Peneduh b. Apotik Hidup / Toga c. Tanaman Bunga 4. Keindahan Lokasi / Objek (Taman) 5. Kebersamaan Warga dan Tingkat Gotong Royong (Intensitas Gotong Royong) 6. Kader Lingkungan Adapun Kriteria Kelurahan yang Menerapkan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Dapat Dilihat dari Beberapa Indikator, di antaranya : 1. Persalinan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan 2. Memberi Bayi ASI Eksklusif 3. Menimbang Balita Setiap Bulan 4. Menggunakan Air Bersih 5. Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun 6. Menggunakan Jamban Sehat 7. Memberantas Jentik di Rumah Sekali Seminggu 8. Makan Sayur dan Buah Setiap Hari 9. Melakukan Aktifitas Fisik Setiap Hari 10. Tidak Merokok di Dalam Rumah
		Persentase Pos Kamling yang Aktif	% (Persen)	Untuk Mengetahui Pos Kamling yang Aktif di Kecamatan	Jumlah Pos Kamling yang Aktif <i>Dibagi</i> Jumlah Keseluruhan Pos Kamling di Kecamatan <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan	Kriteria Pos Kamling Aktif Secara Garis Besar Dilihat dari Keaktifan Petugas Pos Kamling dalam Melaksanakan Kegiatan Keamanan dan Ketertiban secara Berkesinambungan yang diantaranya disiplin terhadap jadwal piket, serta Tersedianya Fasilitas yang Dibutuhkan Pos Kamling untuk Menunjang Kegiatan Keamanan dan Ketertiban.
		Persentase Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan)	% (Persen)	Untuk Tercapainya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) yang Terlaksana dalam 1 (Satu) Tahun <i>Dibagi</i> Jumlah Kegiatan yang Ditargetkan Kecamatan dalam 1 (Satu) Tahun <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan	Target Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) Sebanyak 10 (Sepuluh) Kali dalam 1 (Satu) Tahun, tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Diadakannya Kegiatan Monitoring K-3 (Keamanan, Ketertiban, dan Kebersihan) Tambahan apabila Ada Kejadian / Peristiwa yang Sifatnya <i>Incidental</i> (Mendadak).
		Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	% (Persen)	Untuk Mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang Hadir dalam Musrenbang Kecamatan <i>Dibagi</i> Jumlah Keseluruhan Masyarakat yang Diundang pada Musrenbang Kecamatan <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan	Salah Satu Cara yang Dapat Digunakan untuk Mengetahui Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan yaitu dengan Melihat Jumlah Masyarakat yang Hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, karena dalam Hal Ini, Animo, Antusiasme, dan Minat Masyarakat untuk Turut Berpartisipasi Dapat Terlihat secara Langsung.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
		Persentase Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan	% (Persen)	Untuk Mengetahui Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Program / Kegiatan dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) yang Direkomendasikan di Tingkat Kecamatan <i>Dibagi</i> Jumlah Keseluruhan Program / Kegiatan yang Diusulkan <i>Dikali</i> 100%	Kecamatan	Seluruh Program / Kegiatan yang Berasal dari Usulan Masyarakat (Kelurahan) Sejatinya secara Keseluruhan Merupakan Prioritas, namun Akan Dipilih Program / Kegiatan yang Benar-Benar Sangat Prioritas, artinya Program / Kegiatan yang Dipilih Benar-Benar Mewakili Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat Langsung. Selain Itu, Pemilihan Program / Kegiatan Akan Mempertimbangkan dari Sisi Urgensinya (Mendesak, Penting, Perlu Disegerakan) untuk Masyarakat.
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan yang Terlaksana dalam 1 (Satu) Tahun	Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dimaksud Beragam, Mulai dari Kursus, Pelatihan, Penyuluhan, Seminar, dan Sosialisasi, serta Berbagai Jenis Perlombaan, dengan Melibatkan Peran Aktif dari Lembaga Kemasyarakatan, seperti TP PKK, LPM, LPTQ, TP UKS, Kwarran Pramuka, FKPM, Karang taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang Terdapat di Kecamatan.